

**STRATEGI DEBAT CAWAPRES INDONESIA TAHUN 2024:
PELANGGARAN KESANTUNAN BERBAHASA
DAN RESPON PUBLIK**

*INDONESIA'S VICE PRESIDENTIAL DEBATE STRATEGY IN 2024: VIOLATIONS OF LANGUAGE
COURTESY AND PUBLIC RESPONSE*

**Eddo Yanuarius Silli Bataona¹, Akhmad Sofyan², Edy Hariyadi³, Bambang Wibisono⁴,
Asrumi⁵**

^{1,2,3,4,5}Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember

*Corresponding Author: edoyanuarius@gmail.com

Riwayat Artikel:

Dikirim: 11/2/2025; **Direvisi:** 28/4/2025; **Diterima:** 30/6/2025

Abstract

This study aims to describe the forms of violations of politeness in debates based on Leech's theory, reveal the purpose of these violations, and identify the internal and external factors behind them. This study uses a descriptive qualitative approach with a documentation method as a data collection technique, and the analysis is carried out through pragmatic, contextual, and intertextual matching methods. The results of the study show that all candidates, namely Muhaimin, Gibran, and Mahfud, committed violations of politeness with various forms, purposes, and factors. Muhaimin violates the maxim of humility in the form of sarcasm aimed at cornering the opponent. Gibran is the candidate who violates it most often, with strategies in the form of belittling gestures, provocative use of foreign terms, and accusations against opponents to show dominance and public attention. Meanwhile, Mahfud committed violations by showing sarcasm and accusations to maintain self-esteem and control of discourse. Factors causing violations include emotional drives, personal ambitions, situational pressures, each candidate's communication style, the open debate structure, and time constraints.

Keywords: violation of politeness, 2024 vice presidential debate, maksim leech, speech strategy, causal factors

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk pelanggaran kesantunan berbahasa dalam debat berdasarkan teori Leech, mengungkap tujuan pelanggaran tersebut dilakukan, serta mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang melatarbelakanginya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data, dan analisis dilakukan melalui metode padan pragmatik, kontekstual, dan intertekstual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh kandidat, yaitu Muhaimin, Gibran, dan Mahfud, melakukan pelanggaran kesantunan dengan bentuk, tujuan, dan faktor yang beragam. Muhaimin melanggar maksim kerendahan hati dalam bentuk sindiran yang bertujuan menyudutkan lawan. Gibran menjadi kandidat yang paling sering melanggar, dengan strategi berupa gestur meremehkan, penggunaan istilah asing secara provokatif, dan tuduhan kepada lawan untuk menunjukkan dominasi dan perhatian publik. Sementara itu, Mahfud melakukan pelanggaran dengan menunjukkan sindiran dan tuduhan untuk mempertahankan harga diri dan kontrol wacana. Faktor penyebab pelanggaran antara lain dorongan emosional, ambisi personal, tekanan situasional, gaya komunikasi masing-masing kandidat, struktur debat terbuka, dan keterbatasan waktu.

Kata kunci: pelanggaran kesantunan, debat cawapres 2024, maksim leech, strategi tutur, faktor penyebab

PENDAHULUAN

Bahasa memiliki peranan penting sebagai alat penutur dalam menuangkan pikirannya. Pada hakikatnya, bahasa hadir sebagai sarana komunikasi bagi masyarakat berupa lambang bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia (Devianty, 2017:227). Pendapat tersebut sejalan dengan Chaer (2007:1-2) yang menyatakan bahwa bahasa merupakan alat komunikasi yang tersusun atas lambang bunyi dan disepakati oleh suatu kelompok sosial untuk bekerja sama, bertukar informasi, dan menunjukkan identitas dirinya.

Debat merupakan salah satu dari jenis percakapan yang memiliki intensitas komunikasi. Hal itu sejalan dengan definisi Tarigan (2008:92) yang mengungkapkan bahwa debat merupakan suatu bentuk saling bertukar argumen untuk menentukan baik atau tidaknya suatu usulan. Debat tidak hanya sekadar berbicara, tetapi terdapat aturan yang harus dipahami oleh peserta debat, seperti berbicara logis sesuai data dan tidak menyerang pribadi lawan bicara. Jalannya sebuah debat diatur topik bicaranya serta dibatasi waktu oleh moderator. Hal ini menuntut peserta debat dalam menggunakan bahasa yang tepat untuk menyampaikan gagasan secara jelas. Tujuan debat beragam seperti, mengungkap kekuatan dan kelemahan argumen peserta debat, menguji konsistensi logika dan berpikir kritis peserta debat, mengedukasi publik atau audiens terkait isu-isu penting, serta memengaruhi opini publik.

Debat politik menjadi isu yang menarik perhatian publik, salah satunya Debat Cawapres Indonesia 2024, karena hadirnya salah satu kandidat generasi muda yaitu Gibran Rakabuming Raka. Debat ini sebagai ajang penyampaian visi, misi, dan program masing-masing kandidat sekaligus sebagai momen unik karena hadirnya salah satu partisipan muda yang akan membuka pandangan baru terhadap pemilih muda seperti generasi Z. Penggunaan bahasa oleh masing-masing kandidat akan memengaruhi citra mereka. Setiap kandidat pastinya menggunakan berbagai upaya untuk menjatuhkan lawannya dalam mencapai tujuan tertentu, meskipun harus melanggar prinsip kesantunan yang diidealkan harus ditaati di setiap percakapan.

Meskipun secara umum kesantunan dianggap sebagai norma yang ideal dalam komunikasi formal, tetapi dalam ranah debat politik pelanggaran kesantunan justru sering dimanfaatkan sebagai alat retorika untuk membangun citra diri, menggiring opini, bahkan menjatuhkan lawan. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggaran kesantunan tidak semata-mata bentuk penyimpangan pragmatik, melainkan bagian dari taktik komunikasi politik yang penuh makna. Dengan demikian, penelitian ini menjadi relevan dan mendesak untuk dilakukan guna mengungkap bagaimana pelanggaran kesantunan digunakan secara strategis oleh kandidat politik dalam ruang debat publik yang disaksikan oleh masyarakat luas.

Terdapat beberapa penelitian yang mengkaji kesantunan berbahasa dalam politik. Penelitian ini diantaranya, penelitian yang dilakukan oleh Achmad et al. (2020) yang meneliti tentang Strategi Kesantunan Berbahasa dalam Acara Debat Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019. Penelitian ini membahas strategi kesantunan berbahasa dalam debat cawapres tahun 2019 dengan fokus bentuk strategi kesantunan positif dan negatif oleh para peserta debat. Hasil penelitian ini yaitu menyoroti bentuk kepatuhan terhadap prinsip kesantunan dengan hasil data dominan pada strategi kesantunan muka positif dengan penanda solidaritas dan pada muka negatif dengan jenis memberikan penghormatan.. Meskipun menggunakan sumber data yang

sama, yaitu tayangan debat cawapres melalui kanal YouTube, fokus penelitian Achmad et al. berbeda secara mendasar dengan penelitian saat ini. Penelitian terdahulu lebih menyoroti bentuk kepatuhan terhadap prinsip kesantunan (*politeness strategies*), sedangkan penelitian ini justru menekankan pada pelanggaran terhadap prinsip kesantunan berdasarkan teori Leech. Di sinilah letak gap yang signifikan, yaitu masih jarang penelitian yang membedah pelanggaran kesantunan secara sistematis dalam konteks debat cawapres, khususnya pada pemilu tahun 2024 yang memiliki dinamika retorika politik yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini hadir untuk melengkapi kajian pragmatik di ranah debat politik dengan cara mengungkap dimensi pelanggaran yang sering kali dimaknai negatif. Namun, dalam konteks debat, pelanggaran justru berfungsi sebagai strategi komunikasi yang paling efektif. Keterkaitan antara penelitian terdahulu dan penelitian ini terlihat dalam ruang lingkup objek dan sumber data, tetapi berawal dari sudut pandang teoritis dan fokus analisis yang berbeda, sehingga penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam memahami praktik berbahasa politis secara lebih kritis dan kontekstual.

Penelitian kedua dilakukan oleh Damayanti (2023) yang meneliti tentang Pelanggaran Prinsip Kesantunan dalam Komunikasi pada Kolom Komentar *Platform* Wattpad Akun An11ra. Penelitian ini membahas tentang pelanggaran kesantunan pada interaksi informal dan tertulis di media sosial yang bersifat anonim dan asinkron (komentar di Wattpad). Hasil penelitian ini yaitu: 1) pelanggaran kesantunan terjadi pada maksim kerendahan hati, kemurahan hati, kearifan, dan kecocokan. 2) maksim kerendahan hati dan maksim kearifan paling sering dilanggar. 3) faktor yang memengaruhi berupa kritik secara langsung, didorong rasa emosi, protektif terhadap pendapatnya, sengaja memojokkan mitra tutur, dan menuduh mitra tutur. 4) faktor yang sering muncul adalah protektif terhadap pendapatnya. Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian saat ini dalam hal fokus pada pelanggaran prinsip kesantunan Leech dan analisis terhadap faktor penyebab pelanggaran. Namun, perbedaan mendasar terletak pada konteks dan media komunikasi. Damayanti meneliti interaksi informal dan tertulis di media sosial yang bersifat anonim dan asinkron (komentar di Wattpad), sedangkan penelitian ini menelaah praktik pelanggaran kesantunan dalam ranah debat politik formal dan lisan yang ditayangkan secara publik. Gap penelitian terletak pada konteks komunikasi, yaitu masih jarang penelitian yang menyoroti bagaimana pelanggaran kesantunan dimanfaatkan secara strategis dalam debat politik, khususnya oleh pejabat negara dalam panggung debat cawapres. Penelitian ini memperluas cakupan kajian pelanggaran kesantunan dengan menempatkannya dalam wacana politik yang penuh strategi retorik dan kepentingan pencitraan, sehingga memperkaya pemahaman tentang fungsi pragmatik pelanggaran kesantunan dalam komunikasi publik. Penelitian ini akan melengkapi penelitian Damayanti dengan menunjukkan bahwa pelanggaran kesantunan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor emosional atau interpersonal, tetapi juga dapat berfungsi sebagai alat persuasif dan dominasi dalam diskursus politik formal.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Ratnaningsih (2017) yang meneliti tentang Kesopanan Berbahasa Cagub dan Cawagub DKI dalam Debat Putaran 1 Sesi Pertama. Penelitian ini menitikberatkan pada kesopanan atau pemenuhan maksim yang dilakukan oleh masing-masing cagub dan cawagub. Hasil penelitiannya berupa maksim kesopanan yang muncul yaitu maksim penghargaan, maksim kecocokan, dan maksim kerendahan hati. Maksim kesopanan yang sering dilanggar yaitu maksim kerendahan hati. Faktor yang memengaruhi pelanggaran kesopanan berbahasa yaitu keterbatasan waktu berbicara dan situasi percakapan. Penelitian ini memiliki

relevansi kontekstual dengan penelitian saat ini, karena juga membahas praktik kebahasaan dalam debat politik formal. Namun, perbedaan mendasar terletak pada fokus analisis. Penelitian Ratnaningsih menitikberatkan pada kesopanan atau pemenuhan maksim, sementara penelitian saya secara khusus mengkaji pelanggaran terhadap prinsip kesantunan Leech, termasuk tujuan strategis dan faktor penyebabnya. Selain itu, pendekatan dalam penelitian saat ini juga menempatkan pelanggaran bukan sekadar sebagai bentuk penyimpangan norma, melainkan sebagai bagian dari strategi retorik yang dapat dimanfaatkan untuk mendominasi lawan debat. Dari segi temporal dan konteks politik, penelitian ini juga merekam fenomena kebahasaan dalam debat cawapres 2024 yang penuh dinamika kekuasaan dan simbolisasi publik. Oleh karena itu, penelitian ini akan memberikan pemahaman lebih dalam mengenai bagaimana pelanggaran kesantunan dalam debat politik tidak hanya sebagai penyimpangan etika komunikasi, tetapi juga sebagai instrumen strategi komunikasi politik yang dapat memengaruhi persepsi publik. Penelitian ini dapat memperluas cakupan dan memperdalam analisis pragmatik politis dalam debat, dibandingkan penelitian Ratnaningsih yang masih berfokus pada aspek normatif kesopanan.

Penelitian keempat dilakukan oleh Hasin et al (2020) yang meneliti tentang Strategi Tindak Tutur Juru Bicara Tim Kampanye Nasional dalam Acara “Dua Arah” di Kompas TV. Penelitian ini berfokus pada strategi tindak tutur juru bicara tim kampanye nasional dalam acara “Dua Arah” di Kompas TV. Penelitiannya menitikberatkan pada klasifikasi jenis tindak tutur berdasarkan fungsinya dalam membentuk strategi kampanye. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa juru bicara TKN menempatkan tindak persuasif pada posisi pertama, tindak menangkis pada posisi kedua, tindak menyerang pada posisi ketiga, dan tindak menantang pada posisi terakhir. Penelitian Hasin et al. relevan dengan penelitian saat ini karena juga mengkaji praktik kebahasaan dalam wacana politik yang berlangsung secara publik dan *live*, dengan tekanan komunikasi tinggi. Namun, terdapat perbedaan mendasar dalam fokus dan sudut pandang teori. Penelitian Hasin et al. menitikberatkan pada klasifikasi jenis tindak tutur berdasarkan fungsinya dalam membentuk strategi kampanye, sementara penelitian saat ini secara khusus menyoroti pelanggaran prinsip kesantunan berdasarkan teori Leech. Penelitian ini mengamati bukan hanya strategi dalam tuturan, melainkan bagaimana pelanggaran terhadap norma kesantunan justru digunakan sebagai strategi dominasi dalam debat cawapres tahun 2024. Dengan demikian, penelitian saat ini mengisi celah atau gap dalam literatur yang masih jarang membahas pelanggaran kesantunan sebagai bentuk tindakan strategis yang memiliki dimensi pragmatik dan politis dalam situasi formal seperti debat. Penelitian terhadap pelanggaran kesantunan dalam debat Cawapres akan memperluas cakupan analisis pragmatik dalam komunikasi politik, dengan menunjukkan bahwa pelanggaran kesantunan bukan hanya bentuk ketidaksantunan, tetapi bagian dari strategi komunikasi politik yang kompleks, efektif, dan memiliki daya pengaruh terhadap publik.

Penelitian kelima dilakukan oleh Gustiani et al. (2020) dengan judul “Strategi Ketidaksantunan dalam Video Debat Pemilihan Presiden Tahun 2019”. Penelitian ini berfokus pada strategi ketidaksantunan yang digunakan oleh masing-masing calon presiden pada tahun 2019. Gustiani et al. dalam penelitian ini lebih menekankan pada ketidaksantunan secara langsung dan eksplisit dalam bentuk strategi *impolite speech acts*, yang cenderung menekankan ketegangan interaksi secara terang-terangan. Hasil penelitian ditemukan 5 bentuk strategi ketidaksantunan, yaitu *withhold politeness* (menahan kesantunan), *sarcasm or mock politeness* (ketidaksantunan sarkasme), *negative impoliteness* (ketidaksantunan negatif), *positive*

impoliteness (ketidaksantunan positif), dan *hald on record impoliteness* (ketidaksantunan secara langsung). Strategi ketidaksantunan negatif menjadi data paling dominan yang ditemukan dalam penelitian tersebut. Meskipun penelitian tersebut secara langsung berkaitan dengan tema ketidaksantunan dalam konteks debat politik, penelitian saat ini mengambil sudut pandang yang berbeda baik dari sisi teori maupun konteks. Penelitian saat ini berfokus pada pelanggaran prinsip kesantunan berdasarkan teori Leech, yang melihat pelanggaran tidak semata-mata sebagai bentuk ketidaksantunan terbuka (*impoliteness*), tetapi sebagai pelanggaran terhadap norma kesopanan dalam interaksi yang dapat terjadi secara halus, implisit, atau terselubung. Di sisi lain, Gustiani et al. lebih menekankan pada ketidaksantunan secara langsung dan eksplisit dalam bentuk strategi *impolite speech acts*, yang cenderung menekankan ketegangan interaksi secara terang-terangan. Dari segi konteks, Gustiani et al. meneliti debat capres, sedangkan penelitian saat ini meneliti debat cawapres tahun 2024, yang memiliki perbedaan karakteristik gaya komunikasi, tujuan retorik, serta strategi yang digunakan oleh para peserta debat. Selain itu, meskipun terdapat kesamaan dalam membahas pelanggaran atau ketidaksantunan, penelitian saat ini lebih memfokuskan pada bagaimana pelanggaran prinsip kesantunan digunakan secara strategis untuk mendominasi wacana, menyerang lawan, atau membentuk citra di hadapan publik dalam situasi formal. Dengan demikian, gap yang diisi oleh penelitian saat ini yaitu pendekatan teoritik yang lebih mendalam terhadap pelanggaran norma-norma kesantunan berdasarkan prinsip-prinsip pragmatik, serta konteks kajian yang spesifik pada debat Cawapres 2024 yang belum banyak diteliti. Penelitian ini juga memberikan kontribusi dalam menunjukkan bahwa pelanggaran kesantunan tidak selalu berkonotasi negatif, melainkan dapat menjadi alat retorik yang digunakan secara strategis dalam kompetisi politik.

Berbeda dengan kelima penelitian di atas, penelitian ini berfokus pada pelanggaran kesantunan berbahasa dalam debat cawapres, merupakan penelitian baru yang belum pernah dilakukan, terutama pada objek Debat Cawapres Indonesia 2024. Penelitian saat ini akan memperluas dan memperkaya kajian baru terkait penggunaan pelanggaran kesantunan sebagai strategi masing-masing kandidat debat cawapres dalam menarik simpati publik. Pada akhirnya, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk pelanggaran kesantunan berbahasa dalam Debat Cawapres 2024 berdasarkan teori kesantunan Leech, mendeskripsikan tujuan terjadinya pelanggaran, dan mendeskripsikan faktor yang menyebabkan terbentuknya pelanggaran oleh masing-masing kandidat.

Dell Hymes (dalam Chaer dan Agustina, 2010:48) menyatakan bahwa suatu peristiwa tutur harus memenuhi delapan komponen, yang jika huruf pertamanya dirangkai menjadi akronim SPEAKING. Komponen tersebut diantaranya: 1) *Setting and scene*, 2) *Participants*, 3) *Ends*, 4) *Act sequences*, 5) *Key*, 6) *Instrumentalities*, 7) *Norms of interaction and interpretation*, dan 8) *Genre*. Sedangkan Searle (dalam Chaer 2010:29-30) membagi tindak tutur berdasarkan fungsinya menjadi lima kategori, yaitu: 1) representatif, 2) direktif, 3) ekspresif, 4), komisif, dan 5) deklaratif.

Grice (dalam Mulyana, 2005:12) membagi dua macam implikatur, yaitu implikatur konvensional dan implikatur percakapan. Implikatur konvensional bersifat nontemporer. Artinya, makna atau pengertian tentang sesuatu lebih permanen. Dalam hal ini, implikatur konvensional adalah pengertian yang bersifat umum dan semua orang umumnya mengetahuinya. Sedangkan implikatur percakapan memiliki makna dan pemahaman yang lebih beragam. Pasalnya, pemahaman terhadap “apa yang dimaksudkan” sangat bergantung pada konteks di mana percakapan itu berlangsung.

Brown dan Levinson (dalam Chaer, 2010:49) mengungkapkan bahwa kesantunan berbahasa itu berikhsar atas nosi muka (*face*). Hal tersebut memiliki arti bahwa kesantunan berbahasa merupakan sebuah strategi untuk menjaga muka atau citra diri pembicara dan lawan bicara dalam interaksi komunikasi. Adapun Leech (2015: 206-207) merumuskan prinsip-prinsip kesantunan yang terdiri atas enam maksim, diantaranya: 1) maksim kearifan yang menuntut setiap peserta pertuturan untuk meminimalkan kerugian orang lain, 2) maksim kedermawanan yang menuntut setiap peserta pertuturan untuk memaksimalkan rasa hormat kepada orang lain, 3) maksim pujian yang mewajibkan setiap peserta dalam pertuturan untuk meminimalkan keuntungannya sendiri, 4) maksim kerendahan hati yang menuntut setiap peserta pertuturan untuk meminimalkan rasa hormat pada diri sendiri, 5) maksim kesepakatan yang menggariskan setiap penutur dan lawan tutur untuk memaksimalkan kecocokan di antara mereka, dan 6) maksim kesimpatian yang mengharuskan setiap peserta pertuturan untuk memaksimalkan rasa simpati kepada lawan tutur.

Adapun Brown dan Levinson (1987) menyatakan bahwa terdapat prinsip kesantunan yang didasarkan pada konsep muka atau *face threatening acts* (FTA), yang terbagi menjadi muka positif dan muka negatif (Rahardi dalam Jayanti dan Subyantoro, 2019:120). Muka positif merujuk pada citra diri seseorang yang ingin agar tindakan atau nilai yang diyakininya dihargai dan diakui oleh orang lain sebagai sesuatu yang baik. Tindakan yang dapat mengancam muka positif mencakup ketidaksetujuan, kritik, penghinaan, keluhan, kemarahan, dakwaan, serta tindakan yang merendahkan atau mempermalukan seseorang. Sementara itu muka negatif berkaitan dengan keinginan seseorang untuk memiliki kebebasan dalam bertindak tanpa tekanan atau kewajiban untuk melakukan sesuatu. Tindakan yang berpotensi mengancam muka negatif meliputi perintah, permintaan, saran, nasihat, peringatan, ancaman, tawaran, janji, pujian, serta ungkapan perasaan negatif seperti kebencian dan kemarahan.

Leech mengungkapkan bahwa pelanggaran sopan santun dapat terjadi karena beberapa alasan dan tujuan, diantaranya: 1) tujuan untuk mencapai komunikasi yang lebih efektif, 2) tujuan untuk menunjukkan otoritas atau kekuatan, 3) tujuan untuk mencapai kepentingan pribadi, 4) tujuan untuk menyampaikan emosi atau ketidakpuasan, dan 5) tujuan untuk menarik perhatian atau menciptakan dampak. Adapun Pranowo (2009:68) menyampaikan beberapa faktor yang mengakibatkan seseorang melanggar prinsip kesantunan ketika berkomunikasi, di antaranya: kritik secara langsung dan tidak langsung, didorong rasa emosi, protektif terhadap pendapatnya, keinginan untuk memojokkan lawan tutur, dan keinginan untuk menuduh lawan tutur.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah ujaran atau tuturan yang diucapkan oleh masing-masing kandidat cawapres yang mengandung pelanggaran maksim kesantunan. Sumber data utama yaitu rekaman video Debat Cawapres Republik Indonesia 2024 yang diunggah pada kanal resmi Youtube KPU RI. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dengan beberapa tahapan, yaitu diawali dengan mengunduh video debat secara utuh, mentranskripsi percakapan para peserta debat kata demi kata, mencantumkan *timestamp* pada setiap bagian tuturan yang dianalisis untuk memastikan sumber asli dan keabsahan data, memilah data menggunakan teknik *purposive sampling* untuk menyaring tuturan yang mengandung pelanggaran prinsip kesantunan menurut teori Leech,

memilah data tuturan dengan mengidentifikasi pelanggaran berdasarkan karakteristik linguistik seperti menyindir, meremehkan, atau menyudutkan, serta mempertimbangkan konteks pragmatik yang menyertainya. Data yang terpilih dikelompokkan berdasarkan jenis maksim kesantunan yang dilanggar. Metode analisis data penelitian ini menggunakan metode padan pragmatik, metode kontekstual, dan metode intertekstual. Pemaparan hasil analisis data menggunakan penyajian informal yaitu dengan memaparkan hasil analisis dalam bentuk deskripsi menggunakan kata-kata biasa dan tulisan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelanggaran Kesantunan Berbahasa Para Kandidat Cawapres Indonesia Tahun 2024

Debat Cawapres tahun 2024 merupakan bagian dari rangkaian debat resmi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI yang diselenggarakan oleh KPU. Debat ini dilaksanakan sebanyak dua kali, yaitu Debat Kedua pada Jumat, 22 Desember 2023 dan Debat Keempat pada Minggu, 21 Januari 2024. Debat tersebut menghadirkan tiga kandidat calon wakil presiden, yakni: Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, Mahfud MD. Debat ini diselenggarakan dengan tujuan memberikan ruang publik bagi para kandidat untuk menyampaikan gagasan dan ide, serta memberi kesempatan bagi pemilih untuk menilai kualitas komunikasi, ketegasan visi-misi, dan kapasitas masing-masing kandidat. Dalam konteks itulah penggunaan bahasa oleh para kandidat menjadi penting, tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai strategi retorika yang mencerminkan kepribadian dan pendekatan politik mereka. Berbagai upaya pastinya digunakan setiap kandidat untuk berusaha menjatuhkan lawannya, seperti pelanggaran kesantunan. Analisis ini mengacu pada teori prinsip kesantunan Leech, yang menyatakan suatu ujaran dikatakan santun jika memenuhi enam maksim kesantunan, yaitu maksim kearifan, kedermawanan, pujian, kerendahan hati, kesepakatan, dan kesimpatian. Sebaliknya, suatu tuturan dikategorikan melanggar kesantunan jika gagal memenuhi satu atau lebih dari maksim-maksim tersebut. Berikut akan dipaparkan beberapa bentuk pelanggaran kesantunan, tujuan terjadinya pelanggaran, dan faktor penyebab pelanggaran kesantunan berbahasa dalam setiap tuturan kandidat selama debat berlangsung. Berikut uraiannya.

Data 1 Kandidat Muhaimin.

Konteks: Tuturan disampaikan oleh Gibran (36 Tahun) sebagai Wali kota Solo kepada Muhaimin (57 Tahun) sebagai Ketua Partai PKB pada Debat Cawapres 2024 yang diselenggarakan di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Minggu 21 Januari 2024, pukul 19.00 WIB, menit 2:29:42-2:32:54. Tema debat dalam debat keempat cawapres meliputi pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup, sumber daya alam dan energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa. Tuturan berisi tentang Gibran yang memberikan pertanyaan kepada Muhaimin terkait dengan LFP (*Lithium Ferro Phosphate*) pada segmen tanya jawab. Muhaimin tidak menjawab secara langsung inti dari pertanyaan Gibran, tetapi justru mempertanyakan inkonsistensinya terkait aturan debat sebelumnya terkait penggunaan singkatan dan mengalihkan pada isu ijazah palsu. Isu mengenai dugaan ijazah palsu Gibran muncul pada akhir tahun 2023, terutama setelah ia dicalonkan sebagai wakil presiden. Tudingan ini berawal dari keraguan beberapa pihak terhadap keaslian ijazah S1 Gibran yang diperoleh dari *University of Bradford* melalui *Management Development Institute of Singapore* (MDIS). Menanggapi tuduhan tersebut, Gibran secara terbuka menunjukkan ijazah aslinya kepada media pada 20 November 2023. Ijazah *Bachelor of Science* dalam bidang

pemasaran yang dikeluarkan oleh *University of Bradford* pada 13 November 2010 di Singapura itu ditampilkan oleh Gibran. Selain itu, Gibran juga memperlihatkan surat keterangan dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, yang menyatakan bahwa ijazah tersebut setara dengan gelar sarjana di Indonesia (Kompas TV, 2023).

Tuturan:

Moderator : Kami persilahkan sekarang cawapres nomor urut 02 Bapak Gibran Rakabuming Raka untuk bertanya kepada cawapres nomor urut 01 Bapak Muhaimin Iskandar, waktu Bapak satu menit dimulai ketika Anda berbicara, terima kasih.

Gibran : Baik terima kasih. Gus Muhaimin, paslon nomor 01 dan tim suksesnya ini sering menggaungkan LFP, LFP, *Lithium Ferro Phosphate*. Saya nggak tahu ini paslon nomor 01 ini anti nikel atau gimana. Mohon dijelaskan. Itu sering digaungkan Pak Tom Lembong itu.

Moderator : Masih ada waktu Pak Gibran, apakah akan digunakan?

Gibran : Akan saya gunakan apabila pertanyaannya belum jelas. Bagaimana Gus? Saya jelaskan juga nggak papa.

Moderator : Singkatan dan terminologi mohon dijelaskan Pak Gibran!

Gibran : LFP, *Lithium Ferro Phosphate*. Itu sering digaungkan Pak Tom Lembong itu.

Moderator : Sekarang kami persilahkan kepada cawapres nomor urut 01 untuk menjawab, waktu Bapak dua menit dimulai ketika Anda berbicara, silahkan.

Muhaimin : Tenang pak Gibran, semua ada etikanya. Termasuk kita diskusi di sini bukan tebak-tebakan definisi, tebak-tebakan singkatan. Kita levelnya adalah kolese dan kebijakan. Prinsipnya sederhana, semua kembali kepada etika Pak Gibran. Etika, sekali lagi etika, etika lingkungan, apapun yang menjadi kebijakan kita menyangkut produksi, pengambilan tambang SDA. Juga apapun yang kita gunakan seluruh potensi bangsa ini, rujukannya adalah etika lingkungan. Komitmen kita, intinya adalah keseimbangan antara meletakkan manusia dan alam. Sekali lagi, intinya bukan hanya etika lingkungan. Tetapi etika bahwa forum ini adalah forum kolese yang berharga. Jangan-jangan kalau kita tebak-tebakan definisi di sini, saya ragu kita ini levelnya SD, SMP, atau jangan-jangan ijazah kita palsu semua di sini. Ini yang mengagetkan, jadi kalau tebak-tebakan ya bukan di sini levelnya. Di sini adalah kebijakan kita untuk memimpin negara.

Data 1 di atas jika ditinjau berdasarkan fungsi tindak tuturnya, termasuk dalam dua jenis tindak tutur yaitu tindak tutur ekspresif dan tindak tutur representatif. Tindak ekspresif terletak pada Muhaimin yang mengungkapkan sikap emosional dan penilaian terhadap gaya komunikasi Gibran yang dianggapnya sebagai permainan tebak-tebakan definisi. Tindak representatif terletak pada Muhaimin yang berusaha menyampaikan klaim bahwa forum debat seharusnya berada di level tinggi dan tidak diisi dengan diskusi yang dianggapnya remeh. Jika dihubungkan dengan teori kesantunan Leech, tuturan Muhaimin melanggar maksim kerendahan hati karena ia menunjukkan sikap merendahkan lawan tutur dengan mempertanyakan tingkat intelektualitas akademik. Pelanggaran ini muncul bukan semata

karena ketidaksantunan personal, melainkan sebagai bentuk strategi retorik untuk mengalihkan ketidaktahuan atau ketidaksiapan Muhaimin dalam menjawab substansi pertanyaan tentang LFP, yaitu isu teknis yang seharusnya ia kuasai sebagai bagian dari program timnya sendiri. Pelanggaran ini menghasilkan implikatur percakapan, yaitu makna tidak tersirat yang dapat ditarik oleh audiens. Implikatur utama dari tuturan Muhaimin yaitu ia meragukan kapasitas intelektual lawan debat dan peserta forum secara keseluruhan, seolah-olah perdebatan yang terjadi dianggap tidak bermutu atau tidak layak di ranah debat politik yang mengutamakan kebijakan. Efek pragmatik dari pelanggaran pada Data 2 yakni terjadinya pergeseran fokus interaksi dari pembahasan substansi terkait *Lithium Ferro Phosphate* (LFP) menjadi serangan terhadap karakter dan kapabilitas peserta debat. Selain itu, efek sosial dari pelanggaran tersebut berimplikasi luas terhadap kualitas debat publik. Pertama, Muhaimin menurunkan standar kesopanan dalam debat politik, menggeser perdebatan dari adu gagasan ke adu serangan personal. Selanjutnya, tindakan ini memperburuk kredibilitas Muhaimin sendiri di mata publik karena menunjukkan ketidakmampuan menghadapi pertanyaan substantif dengan argumentasi rasional.

Tujuan pelanggaran dilakukan oleh Muhaimin pada Data 1 adalah untuk membalas sindiran Gibran sebelumnya yang menyinggung istilah teknis (LFP) tanpa menjelaskan konteks substansialnya. Dengan membawa wacana ke ranah etika dan integritas akademik, Muhaimin mencoba mengalihkan fokus dari sekadar definisi teknis menuju kredibilitas lawan secara keseluruhan. Selain itu, Muhaimin menggunakan strategi pelanggaran ini untuk memojokkan Gibran secara intelektual dan memperkuat citranya sendiri sebagai pemimpin yang lebih layak secara kapasitas dan moral. Faktor penyebab pelanggaran ini terjadi yaitu ungkapan emosional pribadi, ketidaksukaan terhadap gaya komunikasi lawan, tekanan dari lawan debat, serta perbedaan status sosial dan usia.

Data 2 Kandidat Gibran.

Konteks: Tuturan disampaikan oleh Muhaimin (57 Tahun) sebagai Ketua Partai PKB kepada Gibran (36 Tahun) sebagai Wali kota Solo pada debat cawapres 2024 yang diselenggarakan di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Minggu 21 Januari 2024, pukul 19.00 WIB, menit 2:03:31-2:05:24. Muhaimin bertanya kepada Gibran pada debat segmen tanya jawab. Tema debat dalam sesi tanya jawab meliputi pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup, sumber daya alam dan energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa. Tuturan berisi tentang Muhaimin yang menanyakan terkait strategi pembangunan kepada Gibran, dan Gibran yang menjawab pertanyaan berupa sindiran kepada Muhaimin.

Tuturan:

- Muhaimin : Terima kasih. Pak Gibran, Indonesia ini terdiri dari berbagai bioregional. Di mana kita harus betul-betul mengerti pembangunan kita tepat sasaran, dan bisa tumbuh dengan baik. Pertanyaannya, bagaimana strategi Anda dalam melaksanakan pembangunan berbasis bioregional itu, agar keadilan iklim terjaga, keadilan sosial terwujud, keadilan ekologi terlaksana dengan baik, keadilan antargenerasi juga terwujud, sekaligus keadilan sosial.
- Gibran : Gus Muhaimin ini lucu ya, menanyakan masalah lingkungan hidup tapi itu kok pake botol-botol plastik itu. Padahal saya, Pak Ganjar, Prof Mahfud pake botol kaca, itu gimana itu komitmennya, botol plastik semua itu. Tapi nggak papa, kita kembali lagi ke topik ya. Intinya di sini kita sudah

berkomitmen yang namanya pembangunan tidak boleh lagi Jawa sentris, harus mulai Indonesia sentris. Kemarin Gus Muhaimin menolak IKN, tidak apa apa, akan kita lanjutkan dan akan kita perkuat IKN itu. Sekali lagi, yang namanya pembangunan masif, harus memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan keberlanjutan.



Gambar 1. Tanggapan Gibran kepada Muhaimin

Pada Gambar 1 terlihat bahwa Gibran berusaha untuk menggunakan gestur yang ditujukan langsung ke arah Muhaimin. Dalam hal ini, Gibran berusaha menyoroti terkait ketidaksesuaian atas apa yang dikatakan Muhaimin terkait isu lingkungan dengan tindakan nyata, yaitu penggunaan botol plastik.

Data 2 di atas termasuk dalam tindak tutur asertif dan ekspresif menurut teori Searle. Sebagai tindak asertif, Gibran menyatakan klaim tentang realitas yang bertentangan dengan menjaga lingkungan hidup, yang dikemas secara objektif. Namun fungsi utama tuturan ini pada tindak ekspresif, yakni menyatakan sikap penilaian yang meremehkan lawan disertai dengan gestur, dalam hal ini berkaitan dengan komitmen Muhaimin terhadap isu lingkungan. Gibran dalam tuturannya, termasuk melanggar maksim kearifan karena ia memaksimalkan kerugian kepada Muhaimin dengan mengekspos inkonsistensi Muhaimin terkait penggunaan botol plastik. Tuturan Gibran bersifat menyindir dan mempermalukan lawannya, khususnya pada ruang debat yang ditonton masyarakat luas. Dalam tuturan ini, Gibran menciptakan implikatur bahwa Muhaimin tidak sungguh-sungguh dalam perjuangan lingkungan. Makna sebenarnya ditangkap sebagai serangan terhadap etika dan kredibilitas Muhaimin. Ironi dalam tuturan Gibran juga cukup kuat karena frasa yang digunakannya menggarisbawahi pergeseran fungsi bahasa dari media informasi ke media delegitimasi. Efek pragmatik utama dari tuturan ini yaitu terciptanya implikatur bahwa Muhaimin bersikap hipokrit (munafik), yang seakan-akan berbicara soal lingkungan tapi tidak menunjukkan komitmen nyata, bahkan dalam hal kecil seperti wadah minuman. Efek sosial terhadap audiens netral atau pendukung Gibran, sindiran ini dapat dianggap sebagai retorika yang menunjukkan ketajaman observasi dan ketegasan dalam memegang prinsip konsistensi. Hal ini dapat memperkuat citra Gibran sebagai sosok yang kritis dan responsif. Namun, terhadap audiens netral lain atau pendukung Muhaimin, tuturan ini dapat dianggap sebagai bentuk serangan pribadi yang tidak relevan dengan topik, sehingga menurunkan kesan kedewasaan dan kesantunan Gibran sebagai figur publik.

Gibran dalam Data 2 melakukan pelanggaran dengan tujuan sebagai strategi komunikasi yang disengaja untuk menarik perhatian publik. Sindiran sederhana tersebut bukan argumen substantif, namun mengandung efek kejut karena bersifat visual dan mudah ditangkap oleh

penonton. Pelanggaran ini menjadi bagian dari retorika Gibran untuk melemahkan kredibilitas lawan. Faktor penyebab pelanggaran ini terjadi yaitu kepercayaan diri, gaya komunikasi santai disertai gestur, struktur debat terbuka tanpa interupsi moderator, dan perbedaan status sosial antarpeserta debat. Analisis ini dapat diperkuat melalui metode intertekstual dengan mengaitkan respons publik, salah satunya dari juru bicara muda paslon 01 yang diwawancarai dalam podcast kanal Youtube Asumsi dalam episode “Debat Keempat Pilpres: Balas Dendam Sampai Langgar Aturan KPU – Titik Temu” pada menit 08:44-09:11. Pada pernyataan salah satu jubiir tersebut memperkuat temuan bahwa sindiran terhadap botol plastik bukan hanya melanggar norma kesantunan secara linguistik, tetapi juga dinilai oleh pihak eksternal (dalam hal ini jubiir paslon lain) sebagai bentuk pengalihan dari substansi debat. Intertekstualitas yang muncul memperlihatkan bahwa tindakan Gibran berdampak pada persepsi publik, yang merasa bahwa arah debat menjadi berubah karena diselubungi oleh sindiran personal yang kurang produktif.

Data 3 Kandidat Gibran.

Konteks: Tuturan disampaikan oleh Mahfud (67 Tahun) sebagai Menkopolkam kepada Gibran (36 Tahun) sebagai Wali kota Solo pada Debat Cawapres 2024 yang diselenggarakan di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Minggu 21 Januari 2024, pukul 19.00 WIB, menit 2:10:11-2:13:49. Tema debat dalam debat keempat cawapres meliputi pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup, sumber daya alam dan energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa. Tuturan berisi tentang Gibran yang sebelumnya menanyakan mengenai cara mengatasi inflasi hijau kepada Mahfud. Mahfud menjawab pertanyaan dengan mendefinisikan inflasi hijau sama dengan ekonomi hijau dan menjelaskannya kepada Gibran. Jawaban dari Mahfud tidak sesuai dengan ekspektasi dari Gibran dan dianggap tidak tepat dalam menjawab inti dari pertanyaannya. Gibran memperagakan tindakan seperti sedang mencari sesuatu yang diarahkan kepada Mahfud, kemudian menjelaskan maksud sebenarnya dari inflasi hijau.

Tuturan:

- Gibran : Oke, *greenflation* ini adalah, *greenflation* adalah inflasi hijau. Sesimpel itu.
- Moderator : Kami persilahkan kepada cawapres nomor urut 03 Bapak Mahfud MD untuk menjawab, waktu Bapak dua menit, silahkan.
- Mahfud : Baik, untuk mengatasi inflasi hijau. Apa sih inflasi hijau itu, kan ekonomi hijau. Ekonomi hijau itu adalah ekonomi sirkuler, di mana sebuah proses pemanfaatan produk ekonomi, pangan atau produksi apapun, kemudian dimanfaatkan, *direcycle*, bukan dibuat. Jadi bukan barang itu lalu dibiarkan mengganggu ekologi.
- Gibran : Saya lagi nyari jawabannya Prof Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya, kok enggak ketemu jawabannya. Saya tanya masalah inflasi hijau kok malah menjelaskan ekonomi hijau. Prof Mahfud, yang namanya *greenflation* atau inflasi hijau, ya kita kasih contoh yang simpel aja. Demo rompi kuning di Perancis, bahaya sekali, sudah memakan korban. Ya ini harus kita antisipasi jangan sampai terjadi di Indonesia. Kita belajar dari negara maju, negara maju saja masih ada tantangannya. Intinya transisi menuju energi hijau itu harus super hati-hati, jangan sampai membebankan

proses transisi yang mahal pada rakyat kecil. Itu maksud saya inflasi hijau Prof Mahfud, terima kasih.



Gambar 2. Tanggapan Gibran terhadap jawaban Mahfud

Pada Gambar 2 memperlihatkan bahwa Gibran sedang memperagakan seolah-olah sedang mencari sesuatu. Dalam hal ini, tindakan yang dilakukannya dimaksudkan mencari jawaban Mahfud yang sebenarnya tidak sesuai dengan pertanyaan Gibran. Hal ini membuat raut wajah dari Mahfud sedikit emosi dan sinis kepada Gibran.

Data 3 di atas termasuk dalam dua jenis tindak tutur jika ditinjau berdasarkan teori Searle. Tuturan Gibran mengandung tindak representatif dan ekspresif. Tindak representatif dinyatakan melalui ketidakpuasannya terhadap jawaban Mahfud dan merepresentasikan pandangannya bahwa jawaban itu tidak relevan. Sedangkan tindak ekspresif ditunjukkan dengan mengungkapkan rasa kecewa, frustrasi, bahkan sindiran terhadap lawan bicaranya. Selain itu, unsur ironi terlihat jelas pada tuturan Gibran dengan berpura-pura mencari jawaban di sekitarnya. Namun, sebenarnya jawaban itu tidak ada di tempat lain, melainkan terletak pada paparan Mahfud yang tidak relevan. Berdasarkan teori kesantunan Leech, tuturan Gibran melanggar maksim kearifan dan kesepakatan. Dilihat dari sisi maksim kearifan, Gibran memperbesar kerugian wajah bagi Mahfud dengan mempertanyakan kompetensi jawabannya di hadapan publik. Pada maksim kesepakatan, Gibran tidak berusaha untuk meminimalkan ketidaksepakatannya, melainkan justru memperbesar secara terang-terangan dengan mengulang ketidakpuasan secara verbal dan nonverbal (dengan gestur mencari sesuatu). Implikatur yang muncul adalah bahwa jawaban Mahfud dianggap tidak menjawab pertanyaan inti tentang *greenflation*, sehingga meragukan kompetensi Mahfud dalam memahami isu tersebut. Efek pragmatik yang ditimbulkan dari pelanggaran ini memperkuat posisi Gibran dalam topik tertentu, dan secara implisit mengajak audiens untuk meragukan kapabilitas Mahfud. Dengan mempertontonkan secara verbal dan nonverbal ketidakpuasannya atas jawaban Mahfud, Gibran sengaja menciptakan kondisi bahwa Mahfud meskipun berstatus profesor, tidak memahami topik yang diajukan. Efek sosial pelanggaran ini membalikkan hierarki yang seharusnya di hadapan publik, yaitu seorang tokoh muda menantang kredibilitas seorang tokoh senior, sehingga menimbulkan ketegangan norma kesantunan sosial yang lazim menghormati usia dan status akademik.

Tujuan pelanggaran yang dilakukan Gibran pada Data 3 yaitu ia mencoba menekan psikologis lawannya, menyudutkan lawannya, berusaha menunjukkan dominasinya dalam mengontrol arah debat, dan strategi penyerangan muka positif lawan. Faktor yang menjadi penyebab Gibran melakukan pelanggaran meliputi kepercayaan dirinya yang berlebihan, ambisi untuk mendominasi debat, gaya komunikasi yang terlalu santai disertai gestur, dan ketimpangan atau perbedaan usia. Analisis ini dapat diperkuat melalui metode intertekstual dengan mengaitkan respons publik, salah satunya dari juru bicara muda paslon 03 yang

diwawancarai dalam podcast kanal Youtube Asumsi dalam episode “Debat Keempat Pilpres: Balas Dendam Sampai Langgar Aturan KPU – Titik Temu” pada menit 19:05-19:39. Pada pernyataan salah satu jubiir tersebut mencerminkan kritik tidak langsung terhadap strategi komunikatif Gibran, yang dinilai terlalu menekan aspek performatif dan simbolik, seperti penggunaan istilah asing yang tidak umum dan kemungkinan kurang dimengerti oleh khalayak umum maupun oleh lawan debatnyaa. Pernyataan ini memperkuat bahwa tindakan Gibran dalam menyampaikan istilah “*greenflation*” bukan hanya dapat dinilai sebagai pelanggaran kesantunan, tetapi juga dipersepsikan oleh publik sebagai bentuk komunikasi yang kurang berorientasi pada pemahaman dan substansi debat.

Data 4 Kandidat Mahfud.

Konteks: Tuturan disampaikan oleh Gibran (36 Tahun) sebagai Wali kota Solo kepada Mahfud (67 Tahun) sebagai Menkopolkukam pada debat cawapres 2024 yang diselenggarakan di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Minggu 21 Januari 2024, pukul 19.00 WIB, menit 2:12:47-2:15:00. Tema debat dalam debat keempat cawapres meliputi pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup, sumber daya alam dan energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa. Tuturan berisi tentang tanggapan Mahfud terhadap pertanyaan dari Gibran sebelumnya mengenai *greenflation* atau inflasi hijau. Mahfud menanggapi dengan menyatakan bahwa pertanyaan yang disampaikan oleh Gibran tidak memiliki bobot substansial, sehingga tidak layak untuk dijawab.

Tuturan:

- Gibran : Saya lagi nyari jawabannya Prof Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya, kok enggak ketemu jawabannya. Saya tanya masalah inflasi hijau kok malah menjelaskan ekonomi hijau. Prof Mahfud, yang namanya *greenflation* atau inflasi hijau, ya kita kasih contoh yang simpel aja. Demo rompi kuning di Perancis, bahaya sekali, sudah memakan korban. Ya ini harus kita antisipasi jangan sampai terjadi di Indonesia. Kita belajar dari negara maju, negara maju saja masih ada tantangannya. Intinya transisi menuju energi hijau itu harus super hati-hati, jangan sampai membebankan proses transisi yang mahal pada rakyat kecil. Itu maksud saya inflasi hijau Prof Mahfud, terima kasih.
- Mahfud : Saya juga ingin mencari itu jawabannya ngawur juga itu. Ngarang-ngarang ndak karuan, mengaitkan dengan sesuatu yang tidak ada, itu ya. Gini lo, kalau akademis itu gampangnyaa kalau bertanya yang kayak gitu-gitu itu recehan, recehan, recehan. Oleh sebab itu, itu tidak layak dijawab menurut saya, dan oleh sebab itu saya kembalikan ke moderator. Ini ndak layak dijawab pertanyaan kayak gini, ndak ada ini jawabannya, terima kasih.
- Moderator : Cukup buat Pak Mahfud? Cukup ya, baik.
- Mahfud : Saya kembalikan, ndak ada gunanya menjawab.



Gambar 3. Tanggapan Mahfud terhadap pertanyaan Gibran sebelumnya

Pada Gambar 3 terlihat bahwa Mahfud sedikit terpancing emosinya dengan memperagakan kembali tindakan yang dilakukan Gibran kepadanya, yang seolah-olah sedang mencari sesuatu. Mahfud menunjukkan ketidaksepatannya atas pertanyaan Gibran yang ia anggap tidak berbobot untuk ditanyakan, dan menolak secara tegas hingga melempar kembali pertanyaan kepada moderator.

Data 4 di atas jika ditinjau berdasarkan sudut pandang teori tindak tutur Searle, tuturan Mahfud termasuk dalam tindak tutur ekspresif dan deklaratif. Tindak ekspresif terletak pada Mahfud yang menyatakan sikap berupa ketidakpuasan, kejengkelan, dan penilaian negatif terhadap pertanyaan Gibran. Ekspresi tersebut tidak hanya menyampaikan isi pikirannya, tetapi juga merefleksikan keadaan psikologis pembicara, yaitu rasa merendahkan. Sedangkan tindak deklaratif, Mahfud menggunakan otoritas simboliknya sebagai profesor untuk membatalkan validitas pertanyaan itu dalam forum. Mahfud melakukan tindak tutur yang mengubah status percakapan, yang semula dari sesi tanya-jawab yang normatif menjadi sesi yang dinyatakan selesai secara sepihak. Data 4 juga menunjukkan bahwa Mahfud secara jelas melanggar prinsip kesantunan berbahasa, khususnya maksim kearifan dan kesepakatan menurut Leech. Pelanggaran maksim kearifan terjadi karena Mahfud memaksimalkan kerugian terhadap Gibran dengan mempermalukan Gibran di ruang publik dan mempertanyakan kualitas intelektualnya. Pelanggaran maksim kesepakatan terjadi karena Mahfud secara terang-terangan menegaskan validitas pertanyaan Gibran. Implikatur percakapan yang muncul adalah bahwa Mahfud tidak menganggap pertanyaan Gibran layak dijawab secara serius.

Efek pragmatis tuturan ini yaitu terciptanya ketegangan di ruang debat, dengan menggeser fokus dari substansi isi debat menjadi serangan personal. Jika dilihat sudut pandang efek sosial, tuturan Mahfud memiliki dampak yang berlapis, tergantung pada posisi audiens. Bagi pendukung Mahfud, tuturan tersebut dapat memperkuat citra Mahfud sebagai figur intelektual yang tegas, kritis, dan berani mempertahankan standar akademik dalam ruang debat. Sebaliknya, dari sisi pendukung Gibran, tuturan Mahfud berpotensi menimbulkan efek sosial negatif. Pernyataan Mahfud dapat dianggap merendahkan Gibran secara personal di hadapan publik, khususnya dengan penggunaan istilah seperti “recehan,” “ngawur,” dan “ndak karuan.” Di sisi lain, tuturan Mahfud justru dapat berpotensi menjadi efek bumerang sosial pada masyarakat luas. Tuturan itu akan menguatkan simpati terhadap Gibran di kalangan audiens netral atau pendukung Gibran sendiri, karena ia tampil sebagai pihak yang direndahkan namun tetap tenang. Sebaliknya, tuturan Mahfud juga dapat dianggap mempermalukan dirinya sendiri karena tidak dapat menjawab secara substansi atas pertanyaan yang diberikan oleh Gibran.

Tujuan yang ingin dicapai Mahfud dalam pelanggaran pada Data 4 yaitu menjaga wibawanya yang sempat jatuh sebelumnya, mengalihkan fokus pertanyaan kepada aspek

personal lawan, memengaruhi persepsi audiens atau publik, menyudutkan balik lawan, dan strategi penyerangan muka positif lawan. Faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran ini meliputi ungkapan emosional pribadi, kecemasan atau tekanan mental pribadi, ketidaksukaan terhadap gaya bicara lawannya, tekanan dari lawan debat dan audiens seperti sorakan, dan keterbatasan waktu dalam menjawab. Analisis ini dapat diperkuat melalui metode intertekstual dengan mengaitkan respons publik, salah satunya dari juru bicara muda paslon 03 yang diwawancarai dalam podcast kanal Youtube Asumsi dalam episode “Debat Keempat Pilpres: Balas Dendam Sampai Langgar Aturan KPU – Titik Temu” pada menit 15:13-15:52. Pernyataan salah satu jurnalis tersebut memperkuat interpretasi bahwa tanggapan Mahfud sejatinya telah relevan secara substansi, meskipun tidak secara terminologis langsung menyebut “*greenflation*”. Intertekstualitas ini memperlihatkan bahwa pemaknaan publik terhadap tuturan Mahfud cukup objektif dan logis, bahkan dipandang telah menjawab inti pertanyaan secara tidak langsung. Kritik tersebut juga menunjukkan bahwa mungkin terdapat kegagalan komunikasi atau ekspektasi dari Gibran terhadap cara penyampaian, bukan pada isi jawaban Mahfud itu sendiri. Selain itu, aspek keterbatasan waktu yang juga disinggung oleh jurnalis itu menjadi faktor eksternal yang dapat memengaruhi dinamika komunikasi dan potensi munculnya pelanggaran kesantunan secara tidak sengaja.

Respon Publik Terhadap Pelanggaran Kesantunan Kandidat

Fenomena pelanggaran kesantunan dalam debat Cawapres 2024 tidak hanya menunjukkan strategi komunikasi kandidat, tetapi juga berkaitan erat dengan bagaimana masyarakat menanggapi gaya berbahasa politik di ruang publik. Gibran yang cenderung paling banyak melakukan pelanggaran prinsip kesantunan berbahasa, justru menjadi Cawapres terpilih mendampingi Prabowo Subianto. Gibran kerap melakukan pelanggaran dengan penggunaan istilah asing secara provokatif, gestur meremehkan, serta sindiran terhadap lawan debat. Namun, pelanggaran ini tidak menjadi hambatan Gibran dalam meraih dukungan dan justru dinilai positif oleh masyarakat luas. Salah satu faktor yang dapat menjelaskan fenomena ini adalah dominasi daftar pemilih dari kalangan generasi muda, khususnya generasi Z dan milenial, yang tercatat mencapai 58% pemilih dalam Pemilu 2024. Generasi ini cenderung lebih akrab dan toleran terhadap gaya komunikasi yang lugas, satir, bahkan konfrontatif, selama dianggap mewakili keberanian, kecerdasan retorik, dan ketegasan dalam berargumentasi. Dalam konteks ini, pelanggaran yang dilakukan Gibran tidak dipersepsi sebagai kekurangan, tetapi justru sebagai bentuk keunggulan komunikasi politik yang atraktif dan relevan bagi segmen pemilih dominan.

Sebaliknya, strategi debat yang digunakan Muhaimin dan Mahfud, meskipun lebih mengedepankan substansi dengan menyoroti isu krusial seperti food estate dan konflik agraria, terlihat kurang mendapat respons emosional yang luas dan dinilai negatif oleh masyarakat pemilih dominan. Hal ini disebabkan oleh target isu yang lebih mengarah kepada kelompok masyarakat sektor pertanian atau komunitas advokasi lingkungan, sementara pemilih dominan berasal dari wilayah perkotaan, kalangan muda, dan pengguna media sosial yang memiliki kepentingan dan pola pikir berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa makna kesantunan berbahasa dalam politik sangat bergantung pada persepsi serta nilai-nilai yang dianut audiensnya.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pelanggaran kesantunan dalam debat cawapres 2024 tidak terjadi secara acak, melainkan merupakan bagian dari strategi komunikasi yang digunakan oleh para kandidat untuk membentuk citra diri dan menjatuhkan lawan debat. Dari empat data yang dianalisis, ditemukan bahwa Muhaimin melanggar maksim kerendahan hati dengan bentuk sindiran yang merendahkan lawan tuturnya. Tuturannya mengandung tindak tutur ekspresif dan representatif dengan tujuan untuk menyerang balik dan memojokkan lawan tuturnya. Faktor penyebab pelanggaran ini berupa ungkapan emosional pribadi, ketidaksukaan terhadap gaya komunikasi lawan, tekanan dari lawan debat, dan perbedaan status sosial dan usia. Gibran menjadi kandidat yang paling sering melanggar pada maksim kearifan dan kesepakatan dengan bentuk sindiran disertai gestur kepada lawannya. Tuturannya mengandung tindak tutur representatif dan ekspresif dengan tujuan menarik perhatian publik, menekan psikologis lawan, menyudutkan lawan, mengontrol arah debat, dan strategi penyerangan muka. Faktor penyebab pelanggaran di antaranya ambisi mendominasi, gaya komunikasi santai disertai gestur, kepercayaan diri berlebih, perbedaan usia, dan struktur debat terbuka. Mahfud melanggar maksim kearifan dan kesepakatan dengan bentuk sindiran balik kepada lawannya. Tuturannya mengandung tindak tutur ekspresif dan deklaratif dengan tujuan mempertahankan wibawa yang sempat jatuh, mengalihkan fokus pertanyaan, memengaruhi persepsi audiens atau publik, menyudutkan balik lawan, dan strategi penyerangan muka. Faktor penyebab pelanggaran ini berupa ungkapan emosional pribadi, tekanan mental, ketidaksukaan terhadap gaya bicara lawan, tekanan dari lawan debat dan audiens, dan keterbatasan waktu.

Melalui pendekatan intertekstual, ditemukan bahwa respon publik terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut turut memengaruhi makna dan dampak sosial dari tuturan para kandidat. Kritik yang muncul dari publik dalam kanal podcast dan media sosial menunjukkan bahwa pelanggaran kesantunan tidak selalu dipersepsikan negatif, melainkan dapat dianggap efektif dan dinilai positif dalam menarik simpati atau memperkuat daya tarik kandidat. Dengan demikian, pelanggaran kesantunan dalam konteks debat politik tidak hanya menjadi cerminan dinamika komunikasi, tetapi juga mencerminkan strategi retorika yang berkaitan erat dengan persepsi publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, D. P., Retnowaty, R., dan Musdolifah, A. 2020. Strategi Kesantunan Berbahasa dalam Acara Debat Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019. *Kompetensi*, 13(2), 46-58. <https://doi.org/10.36277/kompetensi.v13i2.35>
- Asumsi. 2024, 23 Januari. Debat Keempat Pilpres: Balas Dendam Sampai Langgar Aturan KPU – Titik Temu. [Video]. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=RW6V1XlzAO8&t=1770s>. [Diakses pada 28 Mei 2025].
- Chaer, A. 2007. *Linguistik Umum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Chaer, A. 2010. *Kesantunan Berbahasa*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Chaer, A., dan Agustina, L. 2010. *Sosiolinguistik Perkenalan Awal*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Damayanti, V. A. 2023. Pelanggaran Prinsip Kesantunan dalam Komunikasi pada Kolom Komentar Platform Wattpad Akun *An11ra*. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Ilmu Budaya. Universitas Jember: Jember.
- Devianty, Rina. 2017. Bahasa sebagai Cermin Kebudayaan. *Jurnal Tarbiyah*. 24(2): 227-230. <http://dx.doi.org/10.30829/tar.v24i2.167>
- Gustiani, T., Aslinda, A., dan Usman, F. 2022. Strategi Ketidaksantunan dalam Video Debat Pemilihan Presiden Tahun 2019. *SeBaSa: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 5(1), 104–119. <http://dx.doi.org/10.29408/sbs.v5i1.5501>
- Hasin, I., Sofyan, A., Hariyadi., E. 2020. Strategi Tindak Tutur Juru Bicara Tim Kampanye Nasional dalam Acara “Dua Arah” di Kompas TV. *Semiotika: Jurnal Ilmu Sastra dan Linguistik*, 21(1), 49-58. <https://doi.org/10.19184/semiotika.v21i1.12159>
- Jayanti, M., dan Subyantoro, S. 2019. Pelanggaran Prinsip Kesantunan Berbahasa pada Teks di Media Sosial. *Jurnal Sastra Indonesia*, 8(2), 119-128. <http://dx.doi.org/10.15294/jsi.v8i2.33718>
- KPU RI. 2023, 22 Desember. Debat Kedua Calon Wakil Presiden Pemilu Tahun 2024. [Video]. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=YzC828FyrwM&t=4481s>. [Diakses pada 5 Mei 2025].
- KPU RI. 2024, 21 Januari. Debat Keempat Calon Wakil Presiden Pemilu Tahun 2024. [Video]. Youtube. <https://www.youtube.com/live/anuQxiXpQ7I?si=lbtBKrszwhUB-XD>. [Diakses pada 5 Mei 2025].
- Leech, G. 1983. *The Principles of Pragmatics*. Longman Group Limited. Terjemahan oleh Oka, M. D. D. 2015. *Prinsip-Prinsip Pragmatik*. Cetakan Pertama. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Mulyana. 2005. *Kajian Wacana “Teori, Metode, dan Aplikasi Prinsip-Prinsip Analisis Wacana”*. Yogyakarta: Penerbit Tiara Wacana.
- Pranowo. 2009. *Berbahasa Santun*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Ratnaningsih, D. 2017. Kesopanan Berbahasa Cagub dan Cawagub DKI dalam Debat Putaran I Sesi Pertama. *Edukasi Lingua Sastra*, 15(1), 1-8. <https://doi.org/10.47637/elsa.v23i1>
- Tarigan, Henry. 2008. *Berbicara sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa*. Bandung: Angkasa.